

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA DALAM SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* DI KABUPATEN INDRAMAYU

Oleh:

Slamet Mulyana¹ dan Meria Octavianti²
Program Studi Manajemen Komunikasi Fikom Unpad
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21 Jatinangor
mulyanaslamet@yahoo.com¹
meria.octavianti@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Penggunaan media komunikasi merupakan alternatif untuk sosialisasi kebijakan pemerintah termasuk sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking*. Penggunaan media belum dilakukan sesuai dengan kebutuhan khalayak sehingga belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* dilihat dari intensitas penggunaan media, isi media, dan daya tarik media. Penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu, yang merupakan wilayah dengan jumlah kasus *human trafficking* terbanyak di Jawa Barat. Metode yang digunakan survey deskriptif dengan responden sebanyak 40 orang. Data dikumpulkan dari angket, wawancara, dan studi pustaka, analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* di Indramayu cukup bervariasi mulai dari media konvensional, media digital, bahkan media lokal. Intensitas penggunaan media dinilai sudah cukup memadai walaupun belum terlalu optimal dikarenakan kendala anggaran dan koordinasi di antara subunit di dalam gugus tugas anti *trafficking*. Isi media dinilai masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena informasi yang disampaikan seringkali tidak lengkap, kurang akurat, bahkan beberapa informasi dinilai tidak aktual. Masyarakat mempunyai sumber lain untuk memperoleh informasi seperti dari keluarga atau teman yang sudah atau sedang menjadi buruh migran. Daya tarik media dinilai sudah cukup baik terutama dilihat dari sisi penyajian informasinya.

Kata kunci: *Human Trafficking*, Penggunaan Media, Sosialisasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Indramayu sudah lama dikenal sebagai daerah pengirim (*sending area*) buruh migran ke luar negeri, di mana sebagian besar di antara mereka adalah buruh migran perempuan. Gambaran tentang kondisi dan perkembangan buruh migran di Indramayu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi jumlah maupun wilayah tujuan. Menurut data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker) Kabupaten Indramayu, pada tahun 2013 tercatat ada 16.000 buruh migran dari 31 kecamatan di Indramayu yang berangkat ke luar negeri yang berbekal dokumen lengkap dan mengikuti prosedur yang berlaku (*documented*) (Dinsosnakertrans, 2014). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah buruh migran yang berangkat ke luar negeri jauh lebih banyak, karena tidak semua buruh migran yang ke luar negeri ada dalam catatan Dinsosnaker

kabupaten. Banyak di antara mereka yang berangkat tidak melalui prosedur resmi (*undocumented*).

Sejumlah kalangan di Indramayu menilai bahwa permasalahan buruh migran dan *human trafficking* saling berkaitan. Apabila tidak ditangani dengan baik, kedua masalah itu bisa menjadi masalah serius bagi masyarakat Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah tersebut diawali dengan menerbitkan Perda Indramayu No. 14 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan *Human trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Indramayu adalah kabupaten/kota yang pertama di seluruh Indonesia yang menerbitkan Perda Anti *Trafficking*.

Perda Anti *Trafficking* menjadi ‘payung hukum’ bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan langkah-langkah nyata untuk menangani dan menyelesaikan masalah *human trafficking* di Kabupaten Indramayu. Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan, setelah sebelumnya dibentuk Tim Satuan Tugas Anti *Trafficking* yang melibatkan berbagai unsur aparat pemerintah, perguruan tinggi, serta LSM/Ormas. Satuan Tugas Anti *Trafficking* merupakan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan monitoring penanganan *human trafficking* di Indramayu.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Indramayu, dalam menangani kasus *human trafficking* sudah dilakukan baik upaya yang bersifat *preemptif*, *preventif*, *kuratif*, maupun *rehabilitatif*. Upaya *preemptif* diarahkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi makro yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor pendorong dan faktor penyebab terjadinya kasus *human trafficking*. Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan *human trafficking*. Upaya *preventif* diarahkan untuk mencegah terjadinya kasus *human trafficking* dengan membangun *supporting system* yang mampu memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kasus *human trafficking*. Hal itu antara lain dilakukan dengan membangun jejaring dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat.

Upaya *kuratif* diarahkan untuk menangani korban kasus *human trafficking*, dari mulai penjemputan, penampungan sementara, sampai pemulangan korban ke daerah asal. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan hukum dan pendampingan korban sampai masalahnya selesai. Upaya *rehabilitatif* diarahkan untuk pemulihan kondisi kesehatan fisik dan psikis bagi korban *human trafficking*; reintegrasi korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; serta pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban.

Sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* merupakan langkah awal yang dilakukan Satuan Tugas Anti *Trafficking*, sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kasus *human trafficking*. Sosialisasi, menurut Effendy (1999: 27) adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Proses sosialisasi ini terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar- manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh-mempengaruhi. Komunikasi yang berkaitan dengan proses sosialisasi adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan suatu proses sosialisasi untuk menciptakan pencapaian stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat dipupuk, dibina dan diperluas. Melalui komunikasi sosial, masalah-masalah sosial dipecahkan melalui konsensus (Bungin, 2006: 32).

Dalam hal ini, agar kegiatan sosialisasi berjalan optimal dibutuhkan pendekatan-pendekatan komunikasi yang relevan dengan situasi dan kondisi lokal. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai *stakeholders* baik dari kalangan institusi pemerintah melalui dinas/instansi terkait, perguruan

tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh masyarakat. Penanganan *human trafficking* merupakan kegiatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi sehingga seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan memainkan perannya secara optimal. Mengingat faktor penyebab *human trafficking* yang bersifat multifaktor, maka dalam upaya penanganan *human trafficking* haruslah ditujukan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut dengan melakukan kegiatan yang implementatif dan langsung dirasakan manfaatnya.

Adanya berbagai kendala dalam upaya penanganan *human trafficking* menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Kendala yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan partisipasi masyarakat yang kurang kondusif terhadap sosialisasi penanganan *human trafficking* merupakan fenomena yang menarik untuk kajian komunikasi. Salah satunya berkaitan dengan kajian penggunaan media dalam sosialisasi kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah ‘gagal’ dalam melakukan sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* kepada para *stakeholders*, termasuk kepada masyarakat. Sosialisasi kebijakan tidak didukung oleh program komunikasi dan penggunaan media yang optimal sehingga tidak mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu program/kegiatan yang ditawarkan.

Saluran komunikasi yang digunakan dalam aktivitas komunikasi tidak hanya media yang bisa menjangkau khalayak luas, tetapi juga media yang diperuntukan seseorang atau perusahaan tertentu. Dalam buku *Marketing Communication*, komunikasi yang menggunakan media seperti itu termasuk komunikasi antarpribadi. Penggunaan media ini dapat disebabkan oleh jarak yang cukup jauh dan dibatasi oleh waktu, sehingga penyampaian pesannya membutuhkan media misalnya surat, folder, flier atau invitation card. Dalam istilah pemasaran, hal itu dinamakan *direct selling* (Kennedy, 2006: 44-45).

Selain media massa dan media personal, terdapat juga media kelompok. Biasanya media itu digunakan pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelompok tertentu seperti seminar, diskusi panel atau pameran. Dalam kegiatan kampanye komunikasi, media massa cenderung ditempatkan sebagai saluran komunikasi utama karena hanya lewat media inilah khalayak dalam jumlah dan tempat yang besar dapat dijangkau dan tersebar diberbagai tempat secara bersamaan. Disamping itu, media massa juga mempunyai kemampuan untuk melakukan persuasi terhadap khalayak. Untuk itu, dalam kegiatan memperkenalkan produk baik itu komersil maupun sosial menurut Rivers, Jensen, dan Peterson (2003:232) terdapat 3 macam persuasi yang dilakukan oleh media massa, Pertama, adalah iklan yang sering dipadukan dengan teknik-teknik kehumasan. Kedua, anjuran-anjuran dalam tajuk rencana, kolom opini, dan artikel-artikel interpretatif yang mendorong pembaca untuk mengambil kesimpulan tertentu, dan Ketiga, aneka artikel informatif atau hiburan yang telah tersirat mempunyai bujukan untuk mengikuti.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana efektivitas Penggunaan Media dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Trafficking di Inramayu”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* dilihat dari intensitas penggunaan media, isi media, dan daya tarik media.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasi data yang ditemukan. Penelitian ini tidak bermaksud untuk mencari atau menjelaskan hubungan, tidak melakukan uji hipotesis atau memuat prediksi. Metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat (Rakhmat, 1996: 22).

Tujuan metode deskriptif yaitu mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang ada, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 1996: 25). Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek, yaitu efektivitas penggunaan media dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu dilihat dari intensitas penggunaan media, isi media, dan daya tarik media.

Penentuan wilayah penelitian dilakukan dengan pertimbangan purposif, yaitu wilayah dengan jumlah kasus paling banyak. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Sampel yang terpilih sebanyak 40 orang dan menjadi responden dalam penelitian ini. Data diperoleh dari penyebaran angket, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan dan menggunakan berbagai media komunikasi. Penggunaan media dan pendekatan komunikasi serta penentuan bentuk kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah di mana kelompok sasaran tersebut berada.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain penyuluhan dan pelatihan. Kedua bentuk kegiatan dimaksudkan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat tentang pencegahan *human trafficking* dan eksploitasi perempuan, serta membangun semacam pusat informasi untuk pencegahan dan penanganan *trafficking* perempuan dan anak. Hal tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan perlunya kepedulian untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam upaya memerangi *human trafficking*.

Melalui penyuluhan dan pelatihan, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman yang cukup komprehensif mengenai apa itu *human trafficking*, gender, bagaimana *human trafficking* dan eksploitasi terjadi, siapa pelaku *human trafficking*, faktor pendorong dan penarik terjadinya *human trafficking*, serta apa yang bisa dilakukan untuk mencegah *human trafficking*. Pemahaman mengenai hal tersebut cukup penting, mengingat tidak semua masyarakat mengetahui mengenai informasi yang benar dan menyeluruh mengenai *human trafficking*.

Penyuluhan dan pelatihan dilakukan dengan menggunakan pendekatan komunikasi kelompok, yang dapat merangsang dan memotivasi masyarakat sebagai peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Peserta diajak untuk memetakan kondisi daerahnya untuk melihat bagaimana *human trafficking* yang terjadi di daerahnya, serta potensi di daerahnya yang dapat digunakan sebagai media pencegahan *human trafficking*. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses sosialisasi yang baik harus dilakukan dengan melihat konteks lokal serta potensi lokal yang ada.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan sosialisasi antara lain dilakukan dengan membuat paguyuban/kelompok di daerah masing-masing peserta, yang akan secara aktif mengkampanyekan tentang bahaya *human trafficking*. Aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan potensi-potensi yang telah ada di masing-masing wilayah, misalnya pengajian, arisan, kelompok ibu-ibu PKK, radio komunitas, dan sebagainya.

Kegiatan komunikasi lain yang dilakukan dalam sosialisasi adalah penyebaran media sebar seperti poster, brosur, *flyers*, *leaflet*, dan lainnya. Berbagai media tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat, terutama kelompok sasaran prioritas, dalam berbagai

kesempatan. Selain itu, media sebar seperti poster ditempelkan di beberapa lokasi strategis seperti di sekolah-sekolah, pesantren, atau papan-papan pengumuman lainnya.

Sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media massa baik melalui radio ataupun melalui media cetak surat kabar. Kegiatan ini dilakukan untuk menyebarkan informasi-informasi tentang *human trafficking* dengan berbagai aspeknya, yang perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Dalam pelaksanaannya, Satuan Tugas Anti *Trafficking* bekerjasama dengan beberapa pengelola radio swasta dan radio komunitas yang ada di Kabupaten Indramayu. Sementara untuk media cetak, Satgas bekerjasama dengan pengelola surat kabar, seperti Indramayu Post, Radar Wilayah Cirebon, dan sebagainya.

Gambaran mengenai Jenis pesan yang disampaikan, Kelompok sasaran yang menjadi prioritas, Bentuk kegiatan utama yang dilakukan, dan Pendekatan/Media Komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan penghapusan *trafficking* dapat dilihat pada Tabel 1 Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pendekatan/media komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi benar-benar dipertimbangkan oleh Satgas untuk disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran yang menjadi prioritas dan bentuk kegiatan yang dilakukan. Pertimbangan ini dimaksudkan agar kegiatan sosialisasi bisa berjalan efektif dan memperoleh hasil yang optimal.

Tabel 1
Jenis Pesan, Kelompok Sasaran, Bentuk Kegiatan dan
Pendekatan/Media Komunikasi Dalam Sosialisasi *Trafficking*

Jenis Pesan Yang Disampaikan	Kelompok Sasaran Prioritas	Bentuk Kegiatan Utama	Pendekatan/Media Komunikasi
Bahaya <i>Trafficking</i>	Seluruh masyarakat	Penyebaran informasi	Media Massa, Media sebar
<i>Trafficking</i> dan Pelacuran	Perempuan dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan	Komunikasi Kelompok
<i>Trafficking</i> dan Perempuan	Perempuan	Pelatihan dan Penyuluhan	Komunikasi Kelompok
<i>Trafficking</i> dan Buruh migrant	Pekerja dan Calon pekerja Migrant	Pelatihan dan Penyuluhan	Komunikasi Kelompok
<i>Trafficking</i> dan Agama	Tokoh Masyarakat Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan FGD	Komunikasi Kelompok
Landasan Hukum <i>Trafficking</i>	PJTKI, LSM Aparat Pemerintah	Pelatihan FGD	Komunikasi Kelompok
Pencegahan dan Penanganan Korban <i>Trafficking</i>	Aparat Pemerintah LSM	Pelatihan FGD	Komunikasi Kelompok
Pengelolaan Shelter dan Trauma Center	Aparat Pemerintah LSM	Pelatihan FGD	Komunikasi Kelompok
Pendidikan Keluarga	Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan	Komunikasi Kelompok
Pendidikan Masyarakat	LSM Tokoh masyarakat	Pelatihan FGD	Komunikasi Kelompok

	Aparat pemerintah		
Jejaring dan Kerjasama Penanganan <i>Trafficking</i>	Aparat pemerintah LSM	Pelatihan FGD	Komunikasi Kelompok

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2015

Dalam penelitian ini, efektivitas penggunaan media dalam sosialisasi penanganan *human trafficking* dilihat dari persepsi responden terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu persepsi terhadap intensitas penggunaan media, persepsi terhadap isi media, dan persepsi terhadap daya tarik media. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden mengenai intensitas penggunaan media, yang dilihat dari frekuensi dan durasi penggunaan media masih belum memadai. Data lapangan yang diperoleh adalah hanya 60 % responden yang menyatakan frekuensi penggunaan media sudah memadai dan 70% menyatakan bahwa lama (durasi) penggunaan media sudah mencukupi.

Temuan kedua berkenaan dengan persepsi responden terhadap isi media, yang dilihat dari kesesuaian isi media, kejelasan informasi, dan aktualitas informasi, juga masih belum optimal. Hal itu bisa dilihat dari rata-rata persepsi responden di wilayah penelitian tentang kesesuaian isi media yang menunjukkan bahwa baru 60% dari responden yang menyatakan bahwa informasi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan sisanya menyatakan kurang sesuai bahkan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkenaan dengan kejelasan informasi yang disampaikan, 60% responden menyatakan bahwa informasinya sudah cukup jelas. Sedangkan persepsi mengenai aktualitas informasi, 70 % responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan cukup aktual.

Temuan ketiga berkenaan dengan persepsi responden terhadap daya tarik media, yang dilihat dari daya tarik isi media dan daya tarik jenis media, sudah cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi informasi dalam berbagai media yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* dikatakan menarik oleh 85% responden. Sedangkan persepsi tentang jenis media yang digunakan, responden, hampir sebagian besar (85%) menyatakan cukup bervariasi (beragam).

Berdasarkan temuan-temuan lapangan dapat dikatakan bahwa secara umum, di wilayah Kabupaten Indramayu penggunaan media dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Intensitas penggunaan media harus lebih ditingkatkan dengan menyusun skala prioritas penggunaan media yang lebih intensif dan mempertimbangkan penggunaan media yang mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan media yang banyak digunakan masyarakat di Indramayu. Isi media juga harus disajikan dengan melihat kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi yang disajikan. Selain itu, isi media harus disesuaikan dengan karakteristik media yang digunakan dan harus selalu diperiksa berkenaan dengan aktualitas informasinya. Hal ini penting mengingat masyarakat sebagai kelompok sasaran membutuhkan informasi yang akurat dan cukup komprehensif, yang disampaikan oleh sumber-sumber yang menurut mereka bisa dipercaya dan memahami apa yang disampaikan.

Selain itu, masyarakat juga mempunyai berbagai alternative sumber informasi berkenaan dengan kebutuhan informasi tentang masalah *human trafficking*. Sumber informasi yang dimaksud antara lain dari sumber langsung seperti dari saudara atau teman yang pernah atau saat ini sedang bekerja sebagai buruh buruh migran di luar negeri, dari calo/sponsor yang membantu mereka untuk bekerja di luar negeri, atau dari berbagai media sosial.

Belum optimalnya upaya penanganan masalah *human trafficking*, termasuk belum optimalnya penggunaan media dalam sosialisasinya disebabkan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, aktivitas pengelolaan media dalam

implementasi kebijakan pemerintah daerah termasuk kebijakan penanganan *human trafficking* melibatkan banyak pihak, khususnya berkenaan dengan keberadaan gugus tugas anti *trafficking* yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur OPD (organisasi perangkat daerah) dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam hal ini, masalah yang sering muncul adalah masalah koordinasi di antara anggota gugus tugas yang diperkuat dengan *ego sector* yang ada pada masing-masing OPD. Masalah tersebut akan semakin rumit jika berkenaan dengan penggunaan anggaran. Hal lain adalah analisis kondisi internal yang kurang komprehensif sehingga penentuan skala prioritas menjadi kurang maksimal. Selain itu juga ada masalah klasik yang berkenaan dengan keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan anggaran.

Faktor internal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam sosialisasi kebijakan penghapusan *trafficking* di Indramayu adalah kejelasan *nomenklatur* kelembagaan daerah. Hal ini berkaitan dengan eselonisasi pejabat dari unsur OPD yang menangani masalah *trafficking* dan bergabung dalam Gugus Tugas Anti *Trafficking*. Dalam pelaksanaan di lapangan, ketidaksetaraan eselonisasi akan sangat menghambat koordinasi di antara unsur-unsur gugus tugas; sulit sekali untuk membuat seorang kepala bidang, kepala bagian, dan kepala seksi untuk duduk bareng dan berkoordinasi dalam posisi setara. Masalah ini sudah muncul sejak lama dan belum ada solusinya sampai saat ini. Bahkan dalam skala yang lebih luas, seperti di tingkat nasional masalah yang sama juga terjadi. Contohnya di tingkat nasional penanganan *trafficking* berada di bawah tanggung jawab Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tetapi di Jawa Barat berada di bawah tanggung jawab Biro Bangsos karena pemberdayaan perempuan posisinya ada di tingkat Sub bidang. Di kabupaten/kota, tanggung jawab berada di Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja karena urusan pemberdayaan perempuan hanya berada di tingkat Sub Bidang pada Kantor Sekretariat Daerah.

Secara eksternal, masalah *human trafficking* di kedua wilayah penelitian memang merupakan masalah yang kompleks mengingat faktor penyebabnya yang bersifat multifaktor. *Human trafficking* menyangkut kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi budaya yang menjadi bagian dari masyarakat Indramayu. Kualitas hidup miskin pada sebagian masyarakat kontradiktif dengan gaya hidup materialistik, budaya konsumtif, membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh pelaku *human trafficking*. Kemiskinan yang dialami sebagian penduduk di beberapa wilayah di Indramayu, terutama kelompok petani di pedesaan membuat kesempatan mereka untuk memperoleh akses pendidikan menjadi sangat terbatas. Masalah *human trafficking* terjadi karena adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indramayu seperti tingkat pendidikan yang rendah dan putus sekolah karena pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi, serta pernikahan dini dan tingkat perceraian yang tinggi.

Sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* merupakan bagian dari kebijakan menyeluruh, kebijakan publik, pemerintah daerah dalam upaya menangani dan menyelesaikan masalah *human trafficking* di Indramayu. Suatu kebijakan publik, seperti dikatakan Putra (2001: 16), merupakan sesuatu yang dinamis dan kompleks; bukan sesuatu yang kaku dan hanya didominasi oleh para pemegang kekuasaan formal. Oleh karenanya, kebijakan publik harus dikembalikan pada makna demokratisnya yaitu kebijakan yang berasal dari, oleh, dan untuk publik (rakyat).

PENUTUP

Gugus Tugas Anti *Trafficking*, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* sudah berupaya menyelaraskan kegiatan sosialisasinya dengan kondisi internal dan kondisi eksternal yang ada di wilayah Indramayu. Hal itu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan mengarahkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan

human trafficking. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kegiatan sosialisasi kebijakan yang baik selayaknya dilakukan dengan melihat konteks lokal serta potensi lokal yang ada.

Penggunaan media dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* di Indramayu merupakan bagian penting, yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya *human trafficking*, sehingga dalam pengelolaannya perlu mempertimbangkan berbagai karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat.

Penggunaan media selayaknya dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen utama dalam komunikasi yaitu sumber dan pesan. Pertimbangan untuk memutuskan sumber yang akan menyampaikan informasi dan pesan yang akan disampaikan sudah disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran serta situasi dan kondisi lingkungan di mana kelompok sasaran berada.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan media dalam sosialisasi kebijakan penanganan *human trafficking* di Indramayu diperlukan koordinasi yang lebih kuat yang melibatkan seluruh OPD dan komponen masyarakat yang tergabung dalam Gugus Tugas Anti *Trafficking*. Dengan koordinasi tersebut dimungkinkan adanya kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan masing-masing bidang dalam gugus tugas. Hal ini penting agar tidak ada tumpang tindih peran dan tanggung jawab sehingga tercipta jejaring kemitraan yang kuat di antara pihak-pihak tersebut sehingga upaya sosialisasi yang akan dilakukan berjalan secara sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Creswell, John W., 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. New York: sage Publications Inc. USA
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication
- Isbandi, Rukminto Adi. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maxwell, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design: An Introduction Approach*. London: Sage Publication.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poloma, Margaret M., 2000. *Sosiologi Kontemporer (terj.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2009. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi ke-4. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 1978. *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Kebijaksanaan*. Yogyakarta: Petaling Jaya

Sumber Lain

- Badan Pusat Statistika Kabupaten Indramayu, 2014. *Indramayu Dalam Angka Tahun 2014*
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, 2014. *Jawa Barat Dalam Angka 2014*
- Darwin, Muhajir, dkk. 2003. *(Living on the Edges) Cross-Border Migration, Trafficking and Sexuality: Case Studies from Southeast Asia*.

- Devi Rahayu. 2011. Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan.
- Dian Noeswantari, dkk. 2011 Mencegah Trafficking melalui Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya,
- Imam Rosadi. 2010. “Konsekuensi Migrasi Internasional terhadap Relasi Gender (Studi tentang buruh migran internasional yang pulang dari bekerja di luar negeri di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat)”. Disertasi Universitas Indonesia.
- Nurul Herawati. 2010. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi/Puslitfo BNP2TKI, 2012.Laporan Tahunan Kondisi dan Perkembangan Pekerja Migran.
- Rizqika Tri Utami dan Sukamdi (2011) yang berjudul “Pengambilan Keputusan Bermigrasi Pekerja Migran Perempuan (Kasus di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo)
- Tim Organisasi Perburuan Internasional (ILO). 2006 “Bergantung pada Tali Rapuh” Studi tentang Situasi Rentan Yang Dihadapi Buruh migran Perempuan dari Kabupaten Sumenep-Madura, Malang, dan Bojonegoro, Jawa Timur.
- Tri Susilowati. 2011. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Feminis Standpoint, 19 November 2012
www.indramayu.go.id, diunduh 15 September 2013